

ABSTRAKSI

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari perbuatan dari pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak negara tersebut diperlukan payung hukum khusus berupa peraturan perundang-undangan yang sifatnya *lex specialis*. Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep pidana denda dan pembayaran uang pengganti; Bagaimana pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Diperoleh analisa pidana denda di dalam Pasal 10 huruf a KUHP adalah sebagai pidana pokok. Untuk besaran Pidana Denda di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP ; “pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen”. Uang pengganti sebagai pidana yang sifatnya tambahan, di dalam KUHP yaitu dalam Pasal 10 huruf b tidaklah dikenal pidana pembayaran uang pengganti. Pasal 10 huruf b KUHP : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, uang pengganti didalam UU Tipikor, diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b. yang mana jumlahnya adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Nilai besaran uang pengganti ditentukan oleh audit yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu auditor public yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh lembaga tersebut, menjadikan dasar yang sah sesuai dengan hukum untuk jaksa maupun hakim dalam menentukan besaran penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti.

Kata Kunci : (Tindak Pidana Korupsi , Uang pengganti, Denda)

ABSTRACT

*Criminal payment of compensation is a consequence of the actions of the perpetrators of corruption offenses that harm the state or the economy, so to take back what is rightfully required country specific legal umbrella in the form of legislation that are *lex specialis*. The formulation of the problem to be studied in this research are: How does the concept of criminal penalties and payment of compensation; What about implementing payment of compensation in cases of corruption. The approach used is to approach the problem approach legislation (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). Retrieved analysis fined in Article 10 letter a of the Criminal Code is the principal offense. To scale Criminal Penalties in the Criminal Code set out in Article 30 paragraph (1) of the Criminal Code; "minimum fine of three dollars and seventy cents". Compensation additional criminal nature, in the Criminal Code, namely in Article 10 letter b is not known criminal for compensation. Article 10 letter b of the Criminal Code: revocation of certain rights, deprivation of certain goods, the judge's verdict, the compensation in the Corruption Act, set out in Article 17 and Article 18 paragraph (1) letter b, which amount is equal to the maximum of property derived from corruption. Value of the compensation is determined by an audit conducted by the independent auditor the public who have the authority by legislation. Of State loss calculation done by the agency, making legitimate basis in accordance with the law for prosecutors and judges in determining sentences amount for compensation.*

Keywords: (Corruption, Money substitutes, penalty)